

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KETIDAKTERWAKILAN
PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009**

Oleh:
SRI MUDRIKAH
NIM E02111010

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak, 2015
e-mail: Sri.Mudrikah1212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tentang ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009 bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009 yaitu pertama faktor politik yang terdiri dari faktor kelembagaan dan politik uang, kedua faktor struktural yang terdiri dari faktor pribadi, faktor sosio-kultural dan faktor ekonomi serta yang terakhir faktor lain-lain yang terdiri dari faktor Undang-undang/peraturan, faktor pemenuhan kuota dan faktor kualitas sumber daya manusia perempuan.

Kata-kata Kunci: Ketidakterwakilan Perempuan, Parlemen, Pemilu Legislatif.

ABSTRACT

This research is about the lack of women's representation in the Assembly at Regional North Kayong based on the final results of legislative elections in 2009. This study aims to explain the factors that caused the lack of women's representation. The results showed that there were three factors that led to the lack of women's representation in the Assembly at Regional North Kayong based on the final results of legislative elections in 2009. The first is political factor that consists of the institutional and money politic factors, the second is structural factor which consisting of personal factors, socio-cultural factors and economic factors as well as the last one is another factor that consists of laws or regulations factors, quota acquirement factors and factors of quality women resource.

Keywords: The lack of representation of women, Parliament, The legislative elections.



A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perempuan memiliki potensi atau berpotensi untuk berpartisipasi dan mempunyai potensi sebagai penguasa atau pemegang kekuasaan (pemimpin). Akan tetapi pada realitanya perempuan belum dapat menembus benteng kepemimpinan tersebut. Tidak banyak dari kalangan perempuan yang terjun ke kancah perpolitik yang berhasil menduduki posisi tertinggi, hanya beberapa perempuan saja yang dapat mendudukinya contohnya saja mantan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri. Beliau adalah perempuan pertama di Indonesia yang menjabat sebagai Presiden.

Dengan melihat masih relatif sedikitnya partisipasi maupun keterwakilan perempuan baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif perempuan perlu berjuang lebih keras untuk dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan. Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik pada pemilu 2009 terus

disuarakan. Secara khusus perjuangan yang ditempuh adalah melalui kebijakan *affirmative action* yaitu dengan pencantuman kuota untuk perempuan di dalam Undang-Undang terkait, yaitu UU Partai Politik dan Pemilihan Umum. Sebagai hasil dari kebijakan *affirmative action* dalam pemilu 2009 tersebut maka dikelurkannya UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu. Tentu dengan adanya syarat ini semakin terbuka lebar kesempatan kaum perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan politik.

Walaupun dengan UU No 2 tahun 2008 dan UU No 10 Tahun 2008 telah mensyaratkan 30 % keterwakilan perempuan dalam partai politik dan pemilu dalam realitanya hampir di seluruh Indonesia baik keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun DPRD kota/kabupaten jumlah perempuan yang duduk di legislatif belum mencapai 30 %. Fenomena ketidakterwakilan perempuan di DPRD juga terjadi di

Kabupaten Kayong Utara, sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kayong Utara menunjukkan bahwa pada pileg tahun 2009 keterwakilan perempuan di DPRD Kayong Utara periode 2009-2014 tidak ada atau 0 %.

2. Perumusan Masalah

Faktor apa saja yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1). Untuk mengetahui hambatan politik menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009.
- 2). Untuk mengetahui hambatan structural menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu baik ilmu politik pada umumnya maupun ilmu sosial lainnya.

2. Manfaat Paraktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dengan penerapan teori di kehidupan nyata baik oleh peneliti, pemerintah maupun masyarakat umum. Dapat memberi pemahaman dan pengetahuan bagi siapa saja yang membaca penelitian ini, serta dapat memberi manfaat bagi DPRD Kabupaten Kayong Utara untuk dapat meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan agar dapat memenuhi kuota 30% perempuan di DPRD.

5. Tinjauan Pustaka

1). Teori Keterwakilan

Representasi berasal dari kata *to represent* (mewakili). Pitkin (dalam Susilastuti, 2013:9) mendefinisikan mewakili (*to represent*) sebagai aktivitas yang

membuat perspektif, pendapat dan suara warga negara hadir atau muncul dalam proses pembuatan kebijakan publik. Keterwakilan selalu berkaitan dengan persoalan Sistem Pemilihan Umum yang merupakan alat bagi terciptanya keterwakilan politik. Menurut Pitkin yang dikutip dalam bukunya Sanit, Keterwakilan politik adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik (Basyar, 2009:192). Menurut Pitkin ada empat pandangan yang berbeda mengenai keterwakilan (Soeseno, 2014:115).

1. Keterwakilan formal

Keterwakilan formal merupakan keterwakilan yang terbentuk sebagai hasil pengaturan-pengaturan institusional yang dilakukan sebelum keterwakilan ada.

2. Keterwakilan Simbolis

Keterwakilan simbolis adalah pandangan tentang cara-cara seorang wakil mengatasnamakan konstituennya

a. Seorang wakil menjadisimbol yang merepresentasikan atau menghadirkan sesuatu yang

sesungguhnya tidak ada (tidak hadir), misalnya bendera atau raja yang merepresentasikan bangsa.

3. Keterwakilan Deskriptif

Keterwakilan deskriptif adalah sebuah bentuk keterwakilan yang berdasarkan pada persamaan atau kemiripan antara wakil dan yang diwakili (konstituen/pemilih). Dalam representasi ini maka wakil menghadirkan sesuatu yang absen dengan mengangkat kemiripan atau mencerminkan kesamaan, dan dalam bertindak ia mengatasnamakan yang diwakilinya.

4. Keterwakilan Substantif

Keterwakilan substantif merupakan konsep keterwakilan yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang wakil adalah untuk kepentingan yang diwakilinya. Representasi ini bukan sekedar *more and less* tetapi bagaimana kepentingan substantif perempuan terrepresentasi secara baik.

2). Hambatan Calon Legislatif Perempuan dalam Merebut Akses Politik Menuju Kursi DPRD

Menurut Pambudi (2012:13-19) ada dua hambatan calon legislatif perempuan dalam merebut akses politik menuju kursi DPRD. Hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Politik

Berikut ini adalah beberapa hambatan politik yang dialami perempuan yang terjun ke dunia politik adalah 1). Hambatan Kelembagaan / Institusi Politik, beberapa hambatan politik yang dialami perempuan dalam partai politik: Elit Partai Politik (Parpol), Penetapan Nomor Urut dan Daerah Pemilihan, Pendidikan Politik dan kebocoran suara pada pemilu. 2) Money Politic/Politik Uang.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural ini adalah hambatan pribadi dan psikologi, hambatan sosio-kultural dan hambatan ekonomi.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Sedangkan subjek penelitian ini adalah:

1. Anggota DPRD laki-laki 5 orang.
2. Calon Legislatif perempuan yang mengikuti pemilu tahun 2009, 13 orang.
3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kayong Utara 2 orang.
4. Partai politik (7 partai politik).

Penelitian ini menggunakan dua macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara terhadap subjek penelitian yang telah ditentukan kemudian dilengkapi dengan studi dokumentasi untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian seperti data DCT yang diperoleh dari KPU Kabupaten Kayong Utara.

C. PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Kayong Utara Hasil Pemilu Legislatif 2009 ada 3 faktor yaitu:

1.Faktor Politik

1).Faktor Kelembagaan/Institusi Politik

Adapun faktor politik yang dialami perempuan dalam partai politik adalah:

a.Elit Partai Politik

Elit partai politik mempunyai pengaruh yang besar di dalam partai politik. Mereka lah yang menentukan segala kebijakan partai politik baik yang menyangkut agenda partai politik maupun kebijakan dalam pemilihan legislatif yang akan diikuti oleh partai politik tersebut. Akan tetapi, dengan segala pengaruh dan kekuasaan para elit partai politik seperti ketua partai politik membuat para elit partai politik tersebut berbuat tidak adil terhadap kader maupun caleg perempuan.

b.Penempatan Nomor Urut dan Daerah Pemilihan

Namun nomor urut awal dalam hal ini nomor urut 1-3 di pemilu legislatif 2004 masih berpeluang besar memenangkan pemilu. Begitu juga pemilu legislatif tahun 2009 ini, di Kayong Utara caleg yang

memenangkan pemilu legislatif sebagian besar berada di nomor urut awal yaitu nomor urut 1-3. Dimana hampir semua partai politik mengatakan bahwa nomor urut 1 dan 2 sudah pasti diduduki oleh ketua dan sekretaris, sehingga perempuan hanya bisa menempati paling awal nomor urut 3 yang memang kader partai politik dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap partai politik. UU No 10 Tahun 2008 sebenarnya sudah mensyaratkan untuk 3 orang bakal calon legislatif harus ada 1 caleg perempuan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa hal itu tidak terlaksana. Sebagian besar caleg perempuan yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2009 menempati nomor urut buncit yaitu menempati nomor urut 4 ke atas.

Penempatan daerah pemilihan juga merupakan faktor yang menentukan seorang caleg dipilih atau tidak oleh rakyatnya. Ada strategi yang dilakukan oleh elit partai politik khususnya laki-laki menempatkan caleg perempuan di daerah pemilihan yang bukan daerah tempat tinggalnya. Dimana caleg

perempuan tersebut tidak memiliki basis massa di daerah tersebut. Strategi penempatan caleg perempuan bukan di daerah pemilihan sendiri dimaksudkan sebagai strategi untuk mengurangi persaingan antara caleg laki-laki dengan caleg perempuan.

c. Pendidikan Politik

Masihrendahnya pendidikan politik bagi perempuan khususnya, membuat mereka kalah bersaing dengan caleg laki-laki yang sudah mempunyai kemampuan dan paham akan politik. Apabila pendidikan politik itu diberikan kepada kader-kadernya sebagian besar kader-kader itu adalah laki-laki sehingga mereka yang banyak mendapatkan pengetahuan akan politik. Sedangkan bagi caleg yang dijemput hanya untuk memenuhi kuota tidak mendapatkan pendidikan politik seperti yang diperoleh oleh caleg laki-laki tersebut. Terkadang mereka tidak mengetahui visi-misi dari partai politik yang mengusung mereka.

2). *Money Politic*/Politik Uang

Money politic tidak hanya berbentuk uang, namun juga dapat

berbentuk barang, seperti sumbangan sarana prasarana tempat ibadah, sarana transportasi jalan dan jembatan, sumbangan baju pengajian untuk ibu-ibu sampai masing-masing individu mendapatkan uang dengan syarat memberikan suaranya bagi caleg yang memberikan uang tersebut dalam pemilu legislatif.

Bagi caleg laki-laki yang pada umumnya mempunyai modal finansial yang banyak dibandingkan caleg perempuan mereka akan dengan mudah melakukan hal tersebut, mereka tidak tanggung-tanggung mengeluarkan banyak uang untuk dapat memenangkan pemilu. Pada pemilu legislatif tahun 2009 ini tidak begitu banyak ditemukan kegiatan *money politic* ini secara besar-besaran, namun ada beberapa oknum yang diketahui oleh panwaslu melakukan tindakan *money politic* ini.

2. Faktor Struktural

1). Faktor Pribadi dan Psikologi

Untuk memasuki dunia politik membutuhkan kepercayaan diri dan kesiapan yang matang bagi oknum yang

menjalankannya. Sebagai kaum laki-laki mereka memang berkeinginan sendiri untuk masuk dalam dunia politik, serta laki-laki rela berkorban agar mendapat apa yang mereka inginkan. Lain halnya dengan perempuan khususnya di Kayong Utara mereka yang menjadi caleg perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009 ini masuk dalam dunia politik sebagian besar atas permintaan partai politik, suami, orang tua, bukan atas keinginan sendiri. Mereka pada dasarnya tidak mengetahui sebenarnya apa itu politik, sehingga apabila mereka sudah menjadi caleg mereka menjalankannya hanya setengah hati.

2). Faktor Sosio-Kultural

Sebagian besar caleg laki-laki yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2009 ini telah menjadi figur dalam masyarakat karena mereka memang sudah dikenal oleh masyarakat. Selain caleg laki-laki sudah banyak yang dikenal oleh masyarakat, mereka memang banyak melakukan sosialisasi atau kampanye kepada masyarakat agar mereka dikenal oleh masyarakat. Sangat

berbeda dengan caleg perempuan yang mana sebagian besar caleg perempuan belum banyak dikenal oleh masyarakat, karena mereka baru tamat SMA dan belum mempunyai figur ketokohan dalam masyarakat.

Faktor kultural juga masih menjadi hambatan bagi perempuan dalam meraih jabatan politik. Meskipun masyarakat tidak menyudutkan perempuan secara langsung bahwa laki-laki itu lebih superior namun pandangan masyarakat terhadap perempuan masih menunjukkan bahwa perempuan itu tidak mampu dalam mengurus politik. Kesadaran pemilih juga masih belum ada dalam memilih perempuan, masyarakat masih belum percaya atau belum diterima jika perempuan masuk dalam politik karena menurut masyarakat perempuan itu hanya di dapur.

3). Faktor Ekonomi

Dari kelima Informan yaitu caleg laki-laki yang berhasil duduk di DPRD yang mengikuti pemilu legislatif tahun 2009 ini memang

mempunyai modal ekonomi yang besar. Selain modal ekonomi yang besar yang dimiliki caleg laki-laki, mereka sebagai kepala keluarga mereka tidak tanggung-tanggung dalam mengeluarkan uang untuk melakukan kampanye. Sedangkan semua caleg perempuan yang dapat saya wawancarai mereka semua mengakui bahwa mereka memang keterbatasan dana dalam mengikuti pemilu, sehingga sangat sulit mereka untuk mengadakan kampanye maupun sosialisasi.

3. Faktor Lain-Lain

1). Faktor Undang-Undang/Peraturan

Dalam pemilu legislatif 2009 di Kabupaten Kayong Utara partai politik yang tidak memenuhi persyaratan kuota 30 % calon perempuan dapat mengikuti pemilu, tidak ada sanksi tegas yang diatur di dalam UU No 10 tahun 2008 tersebut. Selain UU No 10 Tahun 2008 yang tidak tegas mengenai 30 % keterwakilan perempuan dalam daftar calon, Peraturan KPU (PKPU) No 18 Tahun 2008 ini tidak tegas dalam mengatur syarat pencalonan. Dimana bagi partai politik yang tidak

memenuhi kuota 30 % perempuan di bolehkan mengikuti pemilu asalkan memberikan alasan tertulis kepada KPU.

2). Faktor Pemenuhan Kuota

Kesulitan mencari perempuan untuk dijadikan caleg ini membuat partai politik kesulitan memenuhi kuota 30 % perempuan. Ditambah lagi partai politik belum dapat menyiapkan kader-kader yang memang berkualitas dan berkeinginan di dalam mengikuti pemilu sehingga mereka harus mengambil perempuan dari luar kader partai politik yang mana sebatas pemenuhan kuota 30 %. Banyak caleg perempuan yang mengakui bahwa mereka diminta partai politik tertentu untuk mengikuti pemilu, mereka mengatakan bahwa ia menjadi caleg perempuan hanya untuk memenuhi kuota agar partai politik tersebut dapat mengikuti pemilu. Faktor pemenuhan kuota ini merupakan faktor dominan yang menyebabkan tidak ada satu pun caleg perempuan dapat memenangkan pemilu legislatif tahun 2009 di Kabupaten Kayong

Utara, karena caleg perempuan hanya dijadikan syarat untuk memenuhi kuota yang disyaratkan oleh Undang-undang maupun peraturan KPU.

3).Faktor Kualitas Sumber Daya Perempuan

Dalam organisasi politik yaitu partai politik sebagian besar yang memasuki organisasi ini adalah laki-laki mereka sudah berkemampuan dalam mengurus masalah politikserta sebagian besar laki-laki yang masuk dalam partai-partai politik ini berpendidikan S 1, dan mempunyai pengalaman organisasi yang sangat luas baik pada saat mereka kuliah maupun ketika mereka sudah terjun dalam partai politik. Sangat jauh berbeda dengan kaum perempuan di Kayong Utara mereka memang tidak banyak yang tertarik masuk dalam politik seperti partai politik. Dalam pemilu legislatif tahun 2009 ini, sebagian besar caleg perempuan yang terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) adalah lulusan SMA, bahkan ada yang berpendidikan paket C. Selain mereka hanya berpendidikan SMA

mereka kebanyakan baru saja lulus dari bangku SMA pengalaman organisasi mereka tidak ada begitu halnya kemampuan mereka dalam politik itu tidak ada.

D.Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009 ada tiga yaitu:

1). Faktor Politik

a.Faktor Kelembagaan, di mana masih banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh partai politik yang bias gender. Kebijakan elit partai politik tentang penempatan nomor urut dan daerah pemilihan juga menyebabkan caleg perempuan masih belum dapat memenangkan pemilu legislatif 2009.

b.Politik Uang, berdasarkan informasi dari Ketua Panwalu Kayong Utara pada pemilu legislatif 2009 ditemukan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh oknum tim sukses dari caleg laki-laki.

2). Faktor Struktural

a.Faktor Pribadi, sebagian besar caleg perempuan yang mengikuti pemilu legislatif bukan atas keinginan sendiri melainkan atas dasar permintaan partai politik, suami maupun orang tua, sehingga mereka hanya setengah hati menjalankannya.

b.Faktor sosio-kultural, caleg perempuan belum banyak dikenal oleh masyarakat sedangkan caleg laki-laki banyak dikenal masyarakat karena mereka banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat. Caleg perempuan juga belum mendapat kepercayaan dari masyarakat jika terjun dalam politik.

c.Faktor ekonomi, semua caleg perempuan mengakui bahwa mereka tidak mempunyai modal ekonomi yang banyak seperti caleg laki-laki.

3). Faktor Lain-Lain

a. Faktor Undang-Undang/Peraturan, UU No 10 tahun 2008 dan PKPU No 18 tahun 2008 ini belum tegas dalam mengatur syarat kuota 30 % perempuan dalam daftar calon. Hasilnya tidak semua partai politik di

Kayong Utara dapat memenuhi kuota 30 % ini.

b.Faktor Pemenuhan Kuota, sebagian besar caleg perempuan yang mengikuti pemilu legislatif 2009 hanya dijadikan syarat pemenuhan kuota agar partai politik dapat mengikuti pemilu legislatif.

c.Faktor kualitas sumber daya perempuan, yang mana caleg perempuan belum mempunyai kualitas yang memadai dalam mengikuti pemilu tersebut, karena sebagian besar caleg perempuan hanya berpendidikan SMA bahkan ada yang paket C. Ditambah lagi mereka bukan kader partai politik melainkan berasal dari luar partai.

Dari ketiga faktor tersebut, faktor pemenuhan kuota dan faktor kualitas sumber daya perempuan ini merupakan faktor dominan yang menyebabkan ketidakterwakilan perempuan di dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kayong Utara hasil pemilu legislatif 2009.

2. Saran

- 1).Partai politik sebagai alat untuk memperoleh jabatan legislatif harus bisa menyiapkan kader-kader perempuan yang berkualitas agar dapat bersaing dengan caleg laki-laki sehingga perempuan juga dapat duduk di DPRD.
- 2).Sebagai sarana penyelenggara PemiluKPU seharusnya dapat mensosialisasikantentang politik maupun pemilu, serta dapat mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa diperlukan perempuan di DPRD agar sebagai perempuan mereka dapat memperjuangkan kebutuhan atau kepentingan perempuan.
- 3).Perlu kesadaran dari perempuan sebagai calegdimana diperlukan niat dari dalam diri serta kepercayaan yang kuat untuk mengikuti pemilu. Diperlukan usaha yang keras seperti sosialisasi kepada masyarakat agar mereka dikenal oleh masyarakat dan kemudian dapat dipilih oleh masyarakatagar caleg perempuan dapat duduk di DPRD.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Fakih, Mansour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gaffer, Janedjri M. 2013. *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Muslim. 2013. *Teori-Teori Politik*. Bandung: Pustaka Setia
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli, Lili. 2008. *Pemilu 2009 Dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: CV Alika.

2. Sumber Jurnal

- Jurnal Perempuan 79. Pemilu Dan Keterwakilan. Vol. 18 No. 4. November 2013.
- Pambudi, Mohammad Yusuf. 2012. *Perempuan dan Politik: Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Sampang*. S 1 Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga. Surabaya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SRI MUDRIKAH
NIM / Periode lulus : E02111010 / 2015
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : Sri-Mudrikah1212@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Faktor-faktor Yang Menyebabkan Ketidakterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara Hasil Pemilu Legislatif 2009

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet* atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....

NIP. 146911272002121002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 01 - Juni - 2015

Sri Mudrikah

(SRI MUDRIKAH)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).